

LAPORAN KINERJA
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, maka Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial serta Kepala Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial merupakan salah satu perangkat Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 80 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, subag dan Seksi Dinas Sosial. Bidang Pemberdayaan Sosial memiliki tugas pokok dan fungsi.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial memiliki Tugas Pokok Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan lembaga penyelenggara usaha kesejahteraan sosial, pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan dan komunitas terpencil, serta penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial.

Sedangkan Fungsi Kepala Bidang Pemberayaan Sosial adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan partisipasi sosial masyarakat;
2. pembinaan lembaga penyelenggara usaha kesejahteraan sosial ;
3. pemberdayaan fakir miskin, keluarga rentan dan komunitas terpencil ;
4. penanaman nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial ;
5. penyusunan pedoman penyelenggaraan pengembangan partisipasi sosial masyarakat ;
6. pembinaan lembaga penyelenggara usaha kesejahteraan sosial ;

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan unsur penting dalam akuntabilitas kinerja.

Perjanjian kinerja bertujuan untuk :

1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen;
3. Sebagai dasar dalam melakukan Monitoring, evaluasi dan supervise
4. Sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
PERJANJIAN KINERJA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
TAHUN 2015

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)
Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	- Persentase PMKS penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosialnya.	0,03
Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	- Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	15,07

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1. Pemberdayaan Sosial	3.252.523.000,-	APBD
2. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.491.817.000,-	APBD

B. Capaian Kinerja

Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan sosial merupakan perubahan sosial bersifat komprehensif yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat. Dalam laporan kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menunjukkan pencapaian Visi dan Misi Dinas Sosial dengan 2 (dua) sasaran strategis.

Adapun sasaran strategis pertama adalah meningkatnya kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), kedua meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pengukuran kinerja Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tahun 2015 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selengkapnya Hasil capaian kinerja Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tahun 2015 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : “Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”

a. Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja Bidang Pemberdayaan Sosial Tahun 2015 adalah sebagaimana tertera pada table 2 di bawah ini.

Tabel 2
CAPAIAN KINERJA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
TAHUN 2015

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	- Persentase PMKS penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosialnya.	0,03	0,03	100

Memperhatikan tabel 2 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Bidang Pemberdayaan Sosial dengan sasaran "meningkatnya kesejahteraan sosial PMKS" pada tahun 2015 dengan indikator Persentase PMKS penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosialnya dapat disampaikan bahwa pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 1.240 KK atau 0,03 % dari poplasi penduduk miskin di Jawa Timur sebanyak 4.798.120 jiwa, sampai dengan akhir tahun 2015 terealisasi sebanyak 1.240 KK atau 0,03 % dengan capaian kinerja 100 % (kategori "baik"). Capaian indicator ini dicapai melalui pelaksanaan program Pemerdayaan Sosial. Dibandingkan dengan target dalam Renstra sebesar 1.250 orang, maka capaian kinerja sebesar 99,2 %. Capaian ini juga berkontribusi terhadap pecapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial yang telah ditetapkan. Selain itu, pencapaian kinerja tersebut juga mendapat dukungan dari Kementerian Sosial RI melalui pelaksanaan program Pemberdayaan

Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan pada tahun 2015 dapat menjangkau sebanyak 2.620 KK keluarga miskin

b. Alokasi Anggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Sedangkan alokasi anggaran untuk mencapai sasaran strategis “meningkatnya kesejahteraan sosial PMKS” pada Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana data yang termuat dalam table 3 di bawah ini.

**Tabel 3
ALOKASI ANGGARAN BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	- Persentase PMKS penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosialnya.	3.252.523.000	3,87

Memperhatikan table 3 diatas dapat dijelaskan bahwa dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan PMKS dilakukan oleh bidang-bidang Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur termasuk Bidang Pemberdayaan Sosial. Pada tahun 2015 mendapatkan alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 3.252.523.000,- atau 3,87 % dari total Belanja Langsung yakni sebesar Rp. 84.030.990.915,-.

c. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dalam table 6 di bawah ini.

Tabel 4
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran 1 Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial							
Program 1.1 Pemberdayaan Sosial	% PMKS Penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat	0,03	0,03	100	3.252.523.000	2.515.810.316	77,35

Berdasarkan data pada table 4 dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja dengan indicator persentase PMKS penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat dengan target 0,03 % terealisasi sebesar 0,03 % atau 100 %. Capaian kinerja ini dicapai melalui program pemberdayaan sosial dengan alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 3.252.523.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.515.810.316,- atau 77,35 %.

d. Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Efisiensi penggunaan sumber dana Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana tercantum pada table 5 di bawah ini :

Tabel 5
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DANA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	- Persentase PMKS penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosialnya.	100	77,35	22,65

Berdasarkan data pada table 5 diatas dapat dijelaskan bahwa dilihat dari tingkat efisiensi penggunaan sumber dana capaian kinerja Bidang pemberdayaan Sosial dikategorikan **“efisien”**. Dimana PMKS penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 100 %, dan penyerapan anggaran sebesar 77,35 %.

2. Sasaran Strategis : “Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)”

Pembangunan kesejahteraan sosial ditujukan untuk memberi pertolongan pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar mereka memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan dalam rangka memulihkan fungsi sosialnya yang terganggu juga ditujukan pada peningkatan keberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) agar dapat meningkatkan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Paparan berikut akan menjelaskan akuntabilitas kinerja sasaran meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai berikut :

a Pencapaian Kinerja

Pencapaian Kinerja sasaran "meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini.

Tabel : 6
PENCAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	a. Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	15,07	15,07	100

Berdasarkan data pada tabel 6 di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja dengan indikator persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebanyak 2.416 PSKS atau 15,07 % dari populasi PSKS sebanyak 16.033 PSKS. Capaian kinerja ini sebesar 100 % dari target yang ditetapkan atau kategori baik. Capaian kinerja tersebut melalui program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.

b. Alokasi Anggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Alokasi Anggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dinas sosial Provinsi Jawa Timur tahun 2015 dapat dilihat pada table 7 di bawah ini.

Tabel : 7
ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	a. Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	1.491.817.000	1,78

Berdasarkan data pada tabel 7 dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah sebesar Rp. 1.491.817.000,- atau 1,78 % dari total Belanja Langsung Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 84.030.990.915,-.

c. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian kinerja dan anggaran dapat dilihat dengan membandingkan pencapaian target kinerja dengan realisasi anggaran, sebagaimana termuat dalam table 8 di bawah.

Tabel : 8
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial							
Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	15,07	15,07	100	1.491.817.000	1.447.803.140	97,05

Berdasarkan data pada tabel 8 di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja dengan indikator persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan target sebesar 15,07 % dari populasi PSKS sebanyak 16.033 PSKS. Capaian kinerja ini sebesar 100 %. Capaian kinerja tersebut melalui program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.491.817.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.447.803.140,- atau 97,05 %.

d. Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Salah satu aspek yang digunakan untuk melihat akuntabilitas capaian kinerja sasaran adalah efisiensi penggunaan sumber dana yaitu dengan membandingkan capaian kinerja dengan penyerapan anggaran yang mendukung tercapainya sasaran. Tingkat efisiensi dalam mencapai sasaran strategis meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dapat dilihat pada table 9.

Tabel : 9

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DANA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	a. Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100	97,05	efisien

Berdasar data hasil pengukuran terhadap tingkat efisiensi penggunaan sumber dana sebagaimana pada table 9, dapat dijelaskan bahwa pencapaian sasaran strategis meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dikategorikan efisien. Dimana pencapaian kinerja mencapai 100 % dan penyerapan anggaran sebesar 97,05 %.

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Sasaran strategis "meningkatnya kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan indicator Persentase PMKS penerima manfaat program pemberdayaan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosialnya dicapai melalui berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan Bidang dan UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, salah satunya Bidang Pemberdayaan Sosial. Pada tahun 2015 ditergetkan sebanyak 1.240 KK atau 0,03 % dari populasi keluarga miskin di Jawa Timur dan Bidang Pemberdayaan Sosial berhasil menjangkau sebesar 0,03 % atau 100 %. Dibandingkan capaian pada tahun 2014, maka tidak mengalami perubahan/tetap. Sedangkan terhadap target sampai dengan akhir periode Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yakni sebesar 0,15 %, maka tingkat kemajuan pada tahun 2015 sebesar 20 %. Capaian tersebut karena didukung dengan pengalokasian anggaran sebesar Rp. 3.252.523.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.515.810.316,- dengan capaian target yang ditetapkan sebesar 100 %. Sedangkan dilihat dari penggunaan sumber dana dan capaian kinerja, maka pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dapat dikatakan "efisien" dengan tingkat efisiensi sebesar 22,65 %.

Demikian juga dengan capaian sasaran strategis Meningkatkan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan indicator persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pada tahun 2015 dapat tercapai sebanyak 2.416 PSKS atau 15,07 % dari populasi PSKS sebanyak 16.033 PSKS. Capaian kinerja ini sebesar 100 % dari target yang ditetapkan. Dibandingkan capaian pada tahun 2014, maka tidak mengalami perubahan/tetap yaitu 15,07 %. Sedangkan jika dibandingkan dengan target sampai akhir periode Renstra yakni sebesar 69,2 %, maka tingkat kemajuan sebesar 21,78 %. Capaian ini karena didukung dengan pengalokasian anggaran APBD pada program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial sebesar Rp. 1.491.817.000,- . Selanjutnya dilihat dari penggunaan sumber dana dan capaian kinerja, maka pencapaian

sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dapat dikatakan "efisien" dengan tingkat efisiensi sebesar 2,95 %.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan terdahulu dimana secara umum pencapaian sasaran strategis dapat tercapai dengan baik, namun dalam proses pencapaiannya masih ditemui berbagai hambatan yang harus diatasi seperti :

1. Hambatan

- a. Kurangnya pemahaman pendamping terhadap program terutama berkaitan dengan kriteria/persyaratan calon penerima bantuan
- b. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait terutama dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan
- c. Masih perlu peningkatan kegiatan monitoring dan evaluasi

2. Rencana Tindak Lanjut

- a. Meningkatkan pemahaman pendamping melalui bimtek pendamping
- b. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di daerah dalam pencapaian kinerja, monev pelaksanaan program di daerah
- c. Memperluas jangkauan penanganan PMKS
- d. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Bidang Pemberdayaan Sosial

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian dteliti ulangi

Lain-lain.....

.....

.....

BAB III P E N U T U P

Berdasarkan data-data hasil pengukuran kinerja Bidang Pemberdayaan Sosial dapat disimpulkan bahwa target kinerja yang telah diperjanjikan dapat tercapai dengan baik. Hal ini karena adanya dukungan baik berupa kebijakan maupun dukungan anggaran pelaksanaan program/kegiatan utama yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Demikian laporan kinerja ini dapat disusun dengan harapan semoga dapat bermanfaat untuk pengembangan kebijakan selanjutnya.

Mengetahui,
Kepala Dinas Sosial Provinsi
Jawa Timur,

Surabaya, 29 Pebruari 2016
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial,

Dr. S U K E S I, Apt, MARS
Pembina Utama Madya
NIP. 19591021 198903 2 002

ARMAN LINDA, SH, M.Si
Pembina Tkt I
NIP. 19600121 198903 1 005

LAPORAN KINERJA
KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, maka Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial serta Kepala Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial merupakan salah satu perangkat Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 80 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, subag dan Seksi Dinas Sosial. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial memiliki tugas pokok dan fungsi.

Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial memiliki Tugas Pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan bagi balita, anak dan lanjut usia terlantar, serta rehabilitasi sosial bagi anak nakal, korban napza, penyandang cacat dan tuna sosial.

Sedangkan Fungsi Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi balita, anak dan lanjut usia terlantar, serta rehabilitasi sosial bagi anak nakal, korban napza, penyandang cacat dan tuna sosial; pembinaan lembaga penyelenggara usaha kesejahteraan sosial ;
2. Penyusunan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi balita, anak dan lanjut usia terlantar, serta rehabilitasi sosial bagi anak nakal, korban napza, penyandang cacat dan tuna sosial;
3. Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi balita, anak dan lanjut usia terlantar, serta rehabilitasi sosial bagi anak nakal, korban napza, penyandang cacat dan tuna sosial;
4. Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi balita, anak dan lanjut usia terlantar, serta rehabilitasi sosial bagi anak nakal, korban napza, penyandang cacat dan tuna sosial;

5. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan balita, anak dan lanjut usia terlantar, serta rehabilitasi sosial bagi anak nakal, korban napza, penyandang cacat dan tuna sosial;

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan unsur penting dalam akuntabilitas kinerja.

Perjanjian kinerja bertujuan untuk :

1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen;
3. Sebagai dasar dalam melakukan Monitoring, evaluasi dan supervise
4. Sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
PERJANJIAN KINERJA BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
TAHUN 2015

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)
Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	- Persentase PMKS penerima manfaat program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosialnya.	0,25

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	4.986.100.000,-	APBD

B. Capaian Kinerja

Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan sosial merupakan perubahan sosial bersifat komprehensif yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat. Dalam laporan kinerja Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menunjukkan pencapaian Misi 1 Dinas Sosial dan sasaran strategis 1. Adapun sasaran strategis pertama adalah meningkatnya kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pengukuran kinerja Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tahun 2015 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selengkapnya Hasil capaian kinerja Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tahun 2015 sebagai berikut :

Pencapaian kinerja Bidang Pemberdayaan Sosial Tahun 2015 adalah sebagaimana tertera pada table 2 di bawah ini.

Tabel 2
CAPAIAN KINERJA BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
TAHUN 2015

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS penerima manfaat program pelayanan dan Rehabilitasi sosial yang meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya.	0,25	0,25	100

Memperhatikan tabel 2 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Bidang Pemberdayaan Sosial dengan sasaran "meningkatnya kesejahteraan sosial PMKS" pada tahun 2015 dengan indikator Persentase PMKS Penerima manfaat program Pelayanan dan Rehabilitasi sosial yang meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat. Pada tahun 2015 ini ditargetkan sebanyak 1.428 jiwa atau 0,25 % dari populasi PMKS kelompok rehabilitasi sosial

seperti Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Anak jalanan, Gelandangan Psikotik, Penyandang disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Korban Pasung Psikotik dan Anak nakal/ Korban Napza serta Eks Warga Binaan Pemasarakatan dengan jumlah sebanyak 567.903, terealisasi sebanyak 1.428 jiwa atau 0,25 % dengan capaian kinerja 100 % (kategori “baik”). Dibandingkan dengan target dalam Renstra yaitu sebanyak 985 jiwa atau 0,17 %, capaian tahun 2015 pada indicator ini melampaui. Capaian kinerja ini dicapai melalui implementasi Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Capaian ini juga berkontribusi terhadap pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial yang telah ditetapkan.

Sedangkan alokasi anggaran untuk mencapai sasaran strategis “meningkatnya kesejahteraan sosial PMKS” pada Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana data yang termuat dalam table 3 di bawah ini.

Tabel 3
ALOKASI ANGGARAN BIDANG PELAYANAN DAN
REHABILITASI SOSIAL

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS penerima manfaat program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosialnya.	4.986.100.000	5,93

Memperhatikan table 5 diatas dapat dijelaskan bahwa dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan PMKS dilakukan oleh bidang-bidang Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur termasuk Bidang Pelayanan dan

Rehabilitasi Sosial. Pada tahun 2015 mendapatkan alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 4.986.100.000,- atau 5,93 % dari total Belanja Langsung yakni sebesar Rp. 84.030.990.915,-.

Efisiensi penggunaan sumber dana Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana tercantum pada table 4 di bawah ini :

Tabel 4
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DANA

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS penerima manfaat program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosialnya.	100	98,31	1,69

Berdasarkan data pada table 4 diatas dapat dijelaskan bahwa dilihat dari tingkat efisiensi penggunaan sumber dana capaian kinerja Bidang pemberdayaan Sosial dikategorikan “**efisien**”. Dimana PMKS penerima manfaat program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 100 %, dan penyerapan anggaran sebesar 98,31 %.

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Sasaran strategis “meningkatkan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan indicator Persentase PMKS

penerima manfaat program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya dicapai melalui berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan Bidang Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, salah satunya Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 1.428 KK atau 0,25 % dari populasi PMKS kelompok rehabilitasi sosial seperti Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, Anak jalanan, Gelandangan Psikotik, Penyandang disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Korban Pasung Psikotik dan Anak nakal/ Korban Napza serta Eks Warga Binaan Pemasarakatan dengan jumlah sebanyak 567.903, terealisasi sebanyak 1.428 jiwa atau 0,25 % dengan capaian kinerja 100 %. Dibandingkan capaian pada tahun 2014, maka mengalami kenaikan yaitu dari 0,21 % pada tahun 2014 menjadi 0,25 pada tahun 2015. Sedangkan terhadap target sampai dengan akhir periode Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yakni sebesar 0,88 % atau 5.095 orang terealisasi sebanyak 1.428 orang atau 0,25 %, maka tingkat kemajuan pada tahun 2015 sebesar 28,41 %. Capaian tersebut karena didukung dengan pengalokasian anggaran sebesar Rp. 4.986.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.901.917.115,- dengan capaian terhadap target yang ditetapkan adalah sebesar 100 %. Sedangkan dilihat dari penggunaan sumber dana dan capaian kinerja, maka pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dapat dikatakan "efisien" dengan tingkat efisiensi sebesar 1,69 %.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan terdahulu dimana secara umum pencapaian sasaran strategis dapat tercapai dengan baik, namun dalam proses pencapaiannya masih ditemui berbagai hambatan yang harus diatasi seperti :

1. Hambatan

- a. Kurangnya pemahaman pendamping terhadap program terutama berkaitan dengan kriteria/persyaratan calon penerima bantuan

- b. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait terutama dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan
- c. Masih perlu peningkatan kegiatan monitoring dan evaluasi

2. Rencana Tindak Lanjut

- a. Meningkatkan pemahaman pendamping melalui bimtek pendamping
- b. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di daerah dalam pencapaian kinerja, monev pelaksanaan program di daerah
- c. Memperluas jangkauan penanganan PMKS
- d. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian dteliti ulangi

Lain-lain.....

.....

.....

BAB III P E N U T U P

Berdasarkan data-data hasil pengukuran kinerja Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dapat disimpulkan bahwa target kinerja yang telah diperjanjikan dapat tercapai dengan baik. Hal ini karena adanya dukungan baik berupa kebijakan maupun dukungan anggaran pelaksanaan program/kegiatan utama yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Demikian laporan kinerja ini dapat disusun dengan harapan semoga dapat bermanfaat untuk pengembangan kebijakan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial selanjutnya.

Mengetahui,
Kepala Dinas Sosial Provinsi
Jawa Timur,

Dr. S U K E S I, Apt, MARS
Pembina Utama Madya
NIP. 19591021 198903 2 002

Surabaya, 29 Pebruari 2016
Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi
Sosial,

INDRA ISTIANTO, SH, M.M
Pembina Tkt I
NIP. 19630924 198303 1 003

LAPORAN KINERJA
KEPALA BIDANG BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, maka Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial serta Kepala Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial merupakan salah satu perangkat Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 80 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, subag dan Seksi Dinas Sosial. Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial memiliki tugas pokok dan fungsi.

Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial memiliki Tugas Pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan bantuan dan perlindungan sosial bagi korban bencana, korban tindak kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut usia, keluarga dan pekerja migran terlantar serta pengelolaan sumber dana sosial.

Sedangkan Fungsi Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan bantuan, dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, korban tindak kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut usia, keluarga dan pekerja migran terlantar, serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumber dana sosial oleh masyarakat;
2. Penyusunan pedoman penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, korban tindak kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut usia, keluarga dan pekerja migran terlantar serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumber dana sosial oleh masyarakat;
3. Pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, korban tindak kekerasan

terhadap anak, wanita, lanjut usia, keluarga dan pekerja migran terlantar serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumber dana sosial oleh masyarakat;

4. Pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, korban tindak kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut usia, keluarga dan pekerja migran terlantar serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumber dana sosial oleh masyarakat;
5. Pengawasan penyelenggaraan bantuan dan perlindungan kesejahteraan sosial bagi korban bencana, korban tindak kekerasan terhadap anak, wanita, lanjut usia, keluarga dan pekerja migran terlantar serta rekomendasi perijinan dan pengelolaan sumber dana sosial oleh masyarakat;

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan unsur penting dalam akuntabilitas kinerja.

Perjanjian kinerja bertujuan untuk :

1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen;
3. Sebagai dasar dalam melakukan Monitoring, evaluasi dan supervise
4. Sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
PERJANJIAN KINERJA BIDANG BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL
TAHUN 2015

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)
Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS penerima manfaat program bantuan dan perlindungan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosialnya.	1,26

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1. Bantuan dan Perlindungan Sosial	1.247.000.000,-	APBD
2. Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat	3.239.000.000,-	APBD

B. Capaian Kinerja

1. Capaian Kinerja

Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan sosial merupakan perubahan sosial bersifat komprehensif yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat. Dalam laporan kinerja Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa

Timur menunjukkan pencapaian Misi 1 Dinas Sosial dan sasaran strategis 1. Adapun sasaran strategis pertama adalah meningkatnya kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pengukuran kinerja Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tahun 2015 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selengkapnya Hasil capaian kinerja Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tahun 2015 sebagai berikut :
Pencapaian kinerja Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial Tahun 2015 adalah sebagaimana tertera pada table 2 di bawah ini.

Tabel 2
CAPAIAN KINERJA BIDANG BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL
TAHUN 2015

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase penerima manfaat program pelayanan dan Rehabilitasi sosial yang meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya.	1,26	1,26	100

Memperhatikan tabel 2 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Bidang Pemberdayaan Sosial dengan sasaran "meningkatnya kesejahteraan sosial PMKS" pada tahun 2015 dengan indikator Persentase PMKS Penerima manfaat program Bidang bantuan dan Perlindungan sosial yang meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi

kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat. Pada tahun 2015 ini ditargetken sebesar 1,26 % atau 1.720 orang, terealisasi sebanyak 1.720 orang atau 1,26 %, dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori “baik”). Dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 yaitu sebesar 1,43 % dari total populasi PMKS rumpun Program Bantuan dan Perlindungan Sosial sebanyak 136.225 jiwa, maka dapat tercapai sebesar 88,12 %. Capaian kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan Program Bantuan dan Perlindungan Sosial dan Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat.

2. Alokasi Anggaran Pembangunan

Sedangkan alokasi anggaran untuk mencapai sasaran strategis “meningkatnya kesejahteraan sosial PMKS” pada Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial sebagaimana data yang termuat dalam table 3 di bawah ini.

Tabel 3
ALOKASI ANGGARAN BIDANG BANTUAN DAN
PERLINDUNGAN SOSIAL

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS penerima manfaat program bantuan dan perlindungan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosialnya.	4.486.000.000	5,34

Memperhatikan table 3 diatas dapat dijelaskan bahwa dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan PMKS dilakukan oleh bidang-bidang Dinas Sosial

Provinsi Jawa Timur termasuk Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial. Pada tahun 2015 mendapatkan alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 4.486.000.000,- atau 5,34 % dari total Belanja Langsung yakni sebesar Rp. 84.030.990.915,-.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Efisiensi penggunaan sumber dana Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial sebagaimana tercantum pada table 4 di bawah ini :

Tabel 4
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DANA

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS penerima manfaat program Bidang Bantuan dan Perlindungan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosialnya.	100	94,89	5,11

Berdasarkan data pada table 4 diatas dapat dijelaskan bahwa dilihat dari tingkat efisiensi penggunaan sumber dana capaian kinerja Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial dikategorikan “**efisien**”. Dimana PMKS penerima manfaat program bidang Bantuan dan Perlindungan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 100 %, dan penyerapan anggaran sebesar 94,89 %.

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Sasaran strategis "meningkatnya kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan indikator Persentase PMKS penerima manfaat program Bidang Bantuan dan Perlindungan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosialnya dicapai melalui berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan Bidang Bantuan dan Perlindungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 1.720 KK atau 1,26 % dari populasi PMKS rumpun program bantuan dan perlindungan sosial sebanyak 136.225 orang, dan Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial berhasil menjangkau sebanyak 1.720 orang atau 1,26 % dengan capaian kinerja 100 %. Dibandingkan capaian pada tahun 2014, maka mengalami kenaikan yakni dari 0,24 % menjadi 1,26 %. Sedangkan terhadap target sampai dengan akhir periode Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yakni sebesar 9,31 %, maka tingkat kemajuan pada tahun 2015 sebesar 13,53 %. Capaian tersebut karena didukung dengan pengalokasian anggaran sebesar Rp. 4.486.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.304.065.765,- atau 94,89 %. Sedangkan dilihat dari penggunaan sumber dana dan capaian kinerja, maka pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dapat dikatakan "efisien" dengan tingkat efisiensi sebesar 5,11 %.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan terdahulu dimana secara umum pencapaian sasaran strategis dapat tercapai dengan baik, namun dalam proses pencapaiannya masih ditemui berbagai hambatan yang harus diatasi seperti :

1. Hambatan

- a. Kurangnya pemahaman pendamping terhadap program terutama berkaitan dengan kriteria/persyaratan calon penerima bantuan
- b. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait terutama dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan
- c. Masih perlu peningkatan kegiatan monitoring dan evaluasi

2. Rencana Tindak Lanjut

- a. Meningkatkan pemahaman pendamping melalui bimtek pendamping
- b. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di daerah dalam pencapaian kinerja, monev pelaksanaan program di daerah
- c. Memperluas jangkauan penanganan PMKS
- d. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian dteliti ulangi

Lain-lain.....

.....

.....

BAB III P E N U T U P

Berdasarkan data-data hasil pengukuran kinerja Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial dapat disimpulkan bahwa target kinerja yang telah diperjanjikan dapat tercapai dengan baik. Hal ini karena adanya dukungan baik berupa kebijakan maupun dukungan anggaran pelaksanaan program/kegiatan utama yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Demikian laporan kinerja ini dapat disusun dengan harapan semoga dapat bermanfaat untuk pengembangan kebijakan selanjutnya.

Mengetahui,
Kepala Dinas Sosial Provinsi
Jawa Timur,

Surabaya, 29 Pebruari 2016
Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan
Sosial,

Dr. S U K E S I, Apt, MARS
Pembina Utama Madya
NIP. 19591021 198903 2 002

Drs. Ec. ABDUL. KADAR, M.Si
Pembina Tkt I
NIP. 19600728 198603 1 012

LAPORAN KINERJA
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL
TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, maka Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial serta Kepala Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial merupakan salah satu perangkat Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 80 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, subag dan Seksi Dinas Sosial. Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial memiliki tugas pokok dan fungsi.

Kepala Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial memiliki Tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan program dan kelembagaan, penyuluhan dan publikasi serta pengendalian dan pembinaan lanjut usaha kesejahteraan sosial..

Sedangkan Fungsi Kepala Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan program dan kelembagaan, penyuluhan dan publikasi, serta pengendalian dan pembinaan lanjut usaha kesejahteraan sosial;
2. Penyusunan pedoman pengembangan program dan kelembagaan, penyuluhan dan publikasi, serta pengendalian dan pembinaan lanjut usaha kesejahteraan sosial;
3. Pemberian bimbingan teknis pengembangan program dan kelembagaan, penyuluhan dan publikasi, serta pengendalian dan pembinaan lanjut usaha kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan koordinasi teknis pengembangan program dan kelembagaan, penyuluhan dan publikasi, serta pengendalian dan pembinaan lanjut usaha kesejahteraan sosial;

5. Pengawasan penyelenggaraan pengembangan program dan kelembagaan, penyuluhan dan publikasi, serta pengendalian dan pembinaan lanjut usaha kesejahteraan sosial;

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan unsur penting dalam akuntabilitas kinerja.

Perjanjian kinerja bertujuan untuk :

1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen;
3. Sebagai dasar dalam melakukan Monitoring, evaluasi dan supervise
4. Sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
PERJANJIAN KINERJA BIDANG PENGEMBANGAN UKS
TAHUN 2015

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)
Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS penerima manfaat program Pengembangan Kesejahteraan sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosialnya.	2,90

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1. Pengembangan Kesejahteraan Sosial	1.710.000.000,-	APBD

B. Capaian Kinerja

1. Capaian Kinerja

Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan sosial merupakan perubahan sosial bersifat komprehensif yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat. Dalam laporan kinerja Kepala Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menunjukkan pencapaian Misi 1 Dinas Sosial dan sasaran

strategis 1. Adapun sasaran strategis pertama adalah meningkatnya kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pengukuran kinerja Kepala Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tahun 2015 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selengkapnya Hasil capaian kinerja Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tahun 2015 sebagai berikut :

Pencapaian kinerja Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial Tahun 2015 adalah sebagaimana tertera pada table 2 di bawah ini.

Tabel 2
CAPAIAN KINERJA BIDANG BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL
TAHUN 2015

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase penerima manfaat program Pengembangan Kesejahteraan sosial yang meningkatkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan kemampuan fungsi sosialnya.	2,90	2,90	100

Memperhatikan tabel 2 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Bidang Pemberdayaan Sosial dengan sasaran "meningkatnya kesejahteraan sosial PMKS" pada tahun 2015 dengan indikator

Persentase PMKS Penerima manfaat program Pengembangan Kesejahteraan Sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat. Pada tahun 2015 ini ditargetkan sebesar 2,90 % atau 50 orang, terealisasi sebanyak 50 orang atau 2,90 %, dengan capaian kinerja sebesar 100 % (kategori "baik"). Dibandingkan dengan target yang ditetapkan sampai dengan akhir periode Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019 yaitu sebesar 25,52 % atau 440 orang dari total populasi PMKS rumpun Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial sebanyak 1.724 jiwa, maka tingkat kemajuan sebesar 11,36 %. Capaian kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan Program Pengembangan Kesejahteraan Sosial.

2. Alokasi Anggaran Pembangunan

Sedangkan alokasi anggaran untuk mencapai sasaran strategis "meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS" pada Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial sebagaimana data yang termuat dalam table 3 di bawah ini.

Tabel 3
ALOKASI ANGGARAN BIDANG PENGEMBANGAN USAHA
KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2015

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS penerima manfaat program Pengembangan Kesejahteraan Sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosialnya.	1.170.000.000	2,03

Memperhatikan table 3 diatas dapat dijelaskan bahwa dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan PMKS dilakukan oleh bidang-bidang Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur termasuk Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial. Pada tahun 2015 mendapatkan alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 1.170.000.000,- atau 2,03 % dari total Belanja Langsung yakni sebesar Rp. 84.030.990.915,-.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Efisiensi penggunaan sumber dana Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum pada table 4 di bawah ini :

Tabel 4
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DANA

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS penerima manfaat program Pengembangan Kesejahteraan Sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosialnya.	100	98,10	1,90

Berdasarkan data pada table 4 diatas dapat dijelaskan bahwa dilihat dari tingkat efisiensi penggunaan sumber dana capaian kinerja Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial dikategorikan “**efisien**”. Dimana PMKS penerima manfaat program Pengembangan Kesejahteraan Sosial yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar minimalnya dan meningkat kemampuan fungsi sosialnya di masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 100 %, dan penyerapan anggaran sebesar 98,10 %.

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Sasaran strategis “meningkatnya kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan indicator Persentase PMKS penerima manfaat program Pengembangan Kesejahteraan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat kemampuan fungsi sosialnya dicapai melalui berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 50 KK atau 2,90 % dari populasi PMKS rumpun program pengembangan kesejahteraan sosial

sebanyak 1.724 orang, dan Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial berhasil menjangkau sebanyak 50 orang atau 2,90 % dengan capaian kinerja 100 %. Dibandingkan capaian pada tahun 2014, maka tidak mengalami kenaikan atau tetap yakni 2,90 %. Sedangkan terhadap target sampai dengan akhir periode Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yakni sebesar 25,52 %, maka tingkat kemajuan pada tahun 2015 sebesar 11,36 %. Capaian tersebut karena didukung dengan pengalokasian anggaran sebesar Rp. 1.170.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.677.593.791,- atau 98,10 %. Sedangkan dilihat dari penggunaan sumber dana dan capaian kinerja, maka pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dapat dikatakan "efisien" dengan tingkat efisiensi sebesar 1,90 %.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan terdahulu dimana secara umum pencapaian sasaran strategis dapat tercapai dengan baik, namun dalam proses pencapaiannya masih ditemui berbagai hambatan yang harus diatasi seperti :

1. Hambatan

- a. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait terutama dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan
- b. Masih perlu peningkatan kegiatan monitoring dan evaluasi

2. Rencana Tindak Lanjut

- a. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di daerah dalam pencapaian kinerja, monev pelaksanaan program di daerah
- b. Memperluas jangkauan penanganan PMKS
- c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian dteliti ulangi

Lain-lain.....

.....

.....

BAB III P E N U T U P

Berdasarkan data-data hasil pengukuran kinerja Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial dapat disimpulkan bahwa target kinerja yang telah diperjanjikan dapat tercapai dengan baik. Hal ini karena adanya dukungan baik berupa kebijakan maupun dukungan anggaran pelaksanaan program/kegiatan utama yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Demikian laporan kinerja ini dapat disusun dengan harapan semoga dapat bermanfaat untuk pengembangan kebijakan selanjutnya.

Mengetahui,
Kepala Dinas Sosial Provinsi
Jawa Timur,

Surabaya, 29 Pebruari 2016
Kepala Bidang Pengembangan Usaha
Kesejahteraan Sosial,

Dr. S U K E S I, Apt, MARS
Pembina Utama Madya
NIP. 19591021 198903 2 002

Drs. TAUFIQ HASYIM, M.Si
Pembina Tkt I
NIP. 19590207 198703 1 005

LAPORAN KINERJA
SEKRETARIS DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2015

BAB I PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur, maka Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Kepala Bidang Bantuan dan Perlindungan Sosial serta Kepala Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial. Sekretaris merupakan salah satu perangkat Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sesuai Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 80 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, subbag dan Seksi Dinas Sosial. Bidang Pemberdayaan Sosial memiliki tugas pokok dan fungsi.

Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur memiliki Tugas Pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Sedangkan Fungsi Kepala Bidang Pemberayaan Sosial adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ;
2. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
3. Pengelolaan administrasi keuangan ;
4. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
5. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
6. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran;
7. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
8. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
9. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana ;
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan unsur penting dalam akuntabilitas kinerja.

Perjanjian kinerja bertujuan untuk :

1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen;
3. Sebagai dasar dalam melakukan Monitoring, evaluasi dan supervisi
4. Sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
**PERJANIAN KINERJA SEKRETARIS DINAS SOSIAL
TAHUN 2015**

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET (%)
Meningkatnya pelayanan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	- Persentase dukungan kegiatan pembinaan SDM yang dapat mendukung penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100
	- Persentase kegiatan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana yang layak dan mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100
	- Persentase penyelenggaraan adminisrasi keuangan yang mendukung terselenggaranya pembangunan kesejahteraan sosial di Jawa Timur	100
	- Persentase kegiatan penyajian data, penyusunan program/kegiatan yang mendukung efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kesos	100
	-	

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.570.619.070,-	APBD
2. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	10.205.333.250,-	APBD
3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	2.246.575.500,-	APBD
4. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah	1.434.832.000,-	APBD

B. Capaian Kinerja

Sebagaimana kita ketahui bahwa pembangunan sosial merupakan perubahan sosial bersifat komprehensif yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat. Dalam laporan kinerja Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menunjukkan pencapaian Visi dan Misi Dinas Sosial dengan 2 (dua) sasaran strategis. Sasaran strategis tersebut dicapai melalui berbagai program utama dan program penunjang seperti program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Pengukuran kinerja Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tahun 2015 menggunakan metode perbandingan antara capaian kinerja dengan target yang ditetapkan. Selengkapnya Hasil capaian kinerja Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tahun 2015 sebagai berikut :

Sasaran Strategis : “Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Meningkatkan partisipasi PSKS”

1. Pencapaian Kinerja

Pencapaian kinerja Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 adalah sebagaimana tertera pada table 2 di bawah ini.

Tabel 2
CAPAIAN KINERJA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
TAHUN 2015

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan meningkatnya partisipasi PSKS	- Persentase dukungan kegiatan pembinaan SDM yang dapat mendukung penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100	100	100
	- Persentase kegiatan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana yang layak dan mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100	100	100
	- Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan yang mendukung terselenggaranya pembangunan kesejahteraan sosial di Jawa Timur	100	100	100
	- Persentase kegiatan penyajian data, penyusunan program/kegiatan yang mendukung efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100	100	100

Memperhatikan tabel 2 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan sasaran "meningkatnya kesejahteraan sosial PMKS dan meningkatnya partisipasi PSKS" pada tahun 2015 dengan indikator sebagai berikut :

- a. Persentase dukungan kegiatan pembinaan SDM kesejahteraan sosial yang dapat mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial Dapat disampaikan bahwa pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 % atau 584 orang personil Dinas Sosial provinsi Jawa Timur (baik di Dinas maupun UPT). Sampai dengan akhir tahun 2015 terealisasi sebanyak 584 orang atau 100 % dengan capaian kinerja 100 % (kategori "baik").
- b. Persentase kegiatan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana yang layak dan mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh gambaran bahwa pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 % dan terelisasi sebesar 100 % (kategori "baik"). Adapun pengadaan sarana prasarana aparatur berupa pengadaan 6 unit kendaraan roda 4 dan 5 unit roda 2, pengadaan peralatan kantor sebanyak 15 jenis peralatan dan pembangunan fisik sebanyak 2 kegiatan pembangunan. Selain itu juga pemeliharaan sarana prasarana aparatur berupa pemeliharaan gedung Dinas Sosial dan UPT sebanyak 48 lokasi, juga pemeliharaan kendaraan roda 2 sebanyak 130 unit dan 71 unit kendaraan roda 4. Capaian kinerja tersebut melalui pelaksanaan program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur.
- c. Persentase penyelenggaraan administrasi keuangan yang mendukung terselenggaranya pembangunan kesejahteraan sosial di Jawa Timur. Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh data bahwa pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 % atau 12 bulan, terealisasi sebesar 100 % dengan kategori "baik". Capaian kinerja tersebut melalui program pelayanan administrasi perkantoran.
- d. Persentase kegiatan penyajian data, penyusunan program/kegiatan yang mendukung efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kesejahteraan Sosial. Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 % atau 4 dokumen yaitu Rencana Kerja (Renja), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Buku Data PMKS PSKS dan Profil

Dinsos serta dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Capaian kinerja tersebut melalui program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintah.

2. Alokasi Anggaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Sedangkan alokasi anggaran untuk menunjang pencapaian sasaran strategis “meningkatnya kesejahteraan sosial PMKS dan meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial” pada Sekretariat Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagaimana data yang termuat dalam table 3 di bawah ini.

Tabel 3
ALOKASI ANGGARAN SEKRETARIAT DINAS SOSIAL
TAHUN 2015

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)	% ANGGARAN
Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan meningkatnya partisipasi PSKS	- Persentase dukungan kegiatan pembinaan SDM yang dapat mendukung penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	2.246.575.500	2,67
	- Persentase kegiatan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana yang layak dan mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	10.205.333.250	12,15
	- Persentase penyelenggaraan adminisrasi keuangan yang mendukung terselenggaranya pembangunan kesejahteraan sosial	4.570.619.070	5,45

	di Jawa Timur		
	- Persentase kegiatan penyajian data, penyusunan program/kegiatan yang mendukung efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kesos	1.434.832.000	1,71
JUMLAH		18.457.359.820	21,96

Memperhatikan table 3 diatas dapat dijelaskan bahwa dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis meningkatnya kesejahteraan PMKS dan meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Sekretariat Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 mendapatkan alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 18.457.359.820,- atau 21,96 % dari total Belanja Langsung yakni sebesar Rp. 84.030.990.915,-.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Efisiensi penggunaan sumber dana Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial sebagaimana tercantum pada table 4 di bawah ini :

Tabel 4
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DANA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	- Persentase dukungan kegiatan pembinaan SDM yang dapat mendukung penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100	83,54	16,46

(PMKS)	- Persentase kegiatan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana yang layak dan mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100	93,96	6,04
	- Persentase penyelenggaraan adminisrasi keuangan yang mendukung terselenggaranya pembangunan kesejahteraan sosial di Jawa Timur	100	95,17	4,83
	- Persentase kegiatan penyajian data, penyusunan program/kegiatan yang mendukung efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kesos	100	76,35	23,65

Berdasarkan data pada table 4 diatas dapat dijelaskan bahwa dilihat dari tingkat efisiensi penggunaan sumber dana capaian kinerja Sekretariat Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tahun 2015 dikategorikan **“efisien”** Dimana dukungan kegiatan pembinaan SDM yang dapat mendukung penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan capaian kinerja sebesar 100 %, dan penyerapan anggaran sebesar 83,54 %. Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana yang layak dan mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial terlaksana secara baik dengan capaian kinerja mencapai 100 % dan penyerapan anggaran sebesar 93,96 %. Penyelenggaraan adminisrasi keuangan yang mendukung terselenggaranya pembangunan kesejahteraan sosial di Jawa Timur juga terlaksana secara baik, dengan capaian kinerja mencapai 100 % dari target yang ditetapkan dan penyerapan anggaran sebesar 95,17 %. Sedangkan kegiatan penyajian data, penyusunan program / kegiatan yang mendukung

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kesos juga dapat dilaksanakan dengan baik, dengan capaian kinerja sebesar 100 % dari target yang ditetapkan dengan penyerapan anggaran sebesar 76,35 %.

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Indikator kinerja pada Sekretariat merupakan indikator yang menunjang terhadap tercapainya sasaran strategis "meningkatnya kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Persentase partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan hasil penghitungan kinerja terhadap semua indikator yang ditetapkan, maka capaian kinerja Sekretariat dapat mencapai 100 %. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.457.359.820,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.911.151.835,- atau 91,62 % Artinya bahwa pelaksanaan program-program Sekretariat dapat secara signifikan mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan terdahulu dimana secara umum pencapaian sasaran strategis dapat tercapai dengan baik, namun dalam proses pencapaiannya masih diperlukan peningkatan yaitu antara lain:

- a. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat
- b. Meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan dan monev hasil pelaksanaan program
- c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Dinas Sosial.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

Laporan kurang baik

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Realisasi diteliti ulang

Capaian dteliti ulangi

Lain-lain.....

.....

.....

BAB III
P E N U T U P

Berdasarkan data-data hasil pengukuran kinerja Sekretariat Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa target kinerja yang telah diperjanjikan dapat tercapai dengan baik. Hal ini karena adanya dukungan baik berupa kebijakan maupun dukungan anggaran pelaksanaan program / kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran.

Demikian laporan kinerja ini dapat disusun dengan harapan semoga dapat bermanfaat untuk pengembangan kebijakan selanjutnya.

Mengetahui,
Kepala Dinas Sosial Provinsi
Jawa Timur,

Surabaya, 29 Pebruari 2016
Sekretaris Dinas Sosial Provinsi
Jawa Timur,

Dr. S U K E S I, Apt, MARS
Pembina Utama Madya
NIP. 19591021 198903 2 002

Drs. TAUFIQ RACHMAN, M.Si
Pembina Tkt I
NIP. 19580525 198502 1 001